

RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM

AKD: RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Bulan: Juli 2026

Oleh: RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

GAMBAR

PERPUSTAKAAN DPR RI

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887

Fax : (021) 5715846

e-mail: perpustakaan@dpr.go.id

Web: perpustakaan.dpr.go.id

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disusun sebagai respons terhadap kebutuhan penyempurnaan sistem pemilu di Indonesia. Penyusunan RUU didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, termasuk berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah atau memberikan tafsir terhadap sejumlah ketentuan dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, perubahan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, menyelaraskan norma dengan perkembangan ketatanegaraan, serta memperkuat kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

RUU ini diarahkan untuk memperbaiki berbagai aspek penyelenggaraan pemilu, mulai dari pengaturan peserta pemilu, sistem pencalonan, daerah pemilihan, alokasi kursi, tahapan pemilu, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Selain mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, perubahan juga bertujuan menyempurnakan ketentuan yang dalam praktiknya menimbulkan berbagai kendala, sehingga pelaksanaan pemilu dapat berlangsung lebih efektif, transparan, akuntabel, serta menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara.

Melalui perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, DPR RI mengharapkan terwujudnya sistem pemilu yang lebih adaptif terhadap perkembangan demokrasi dan kebutuhan masyarakat. Penyempurnaan regulasi ini diharapkan mampu meningkatkan integritas penyelenggara pemilu, memperkuat kepastian hukum, serta menghasilkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan berlandaskan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

JENIS	KETERANGAN	URL
Berita	Menata Ulang UU Pemilu: Antara Putusan MK, Otonomi Daerah, dan Transisi Kekuasaan	https://www.hukumonline.com/berita/a/menata-ulang-uu-pemilu-n-antara-putusan-mk--otonomi-da-nerah--dan-transisi-kekuasaan-lnt69ea11d7c414b/
Berita	Tiga Alasan UU Pemilu Mendesak Direvisi	https://suaraaisyiyah.id/tiga-nalasan-uu-pemilu-mendesak-direvisi/
Berita	Urgensi Revisi Terbatas UU Pemilu	https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/629
Jurnal	Gambaran Umum Pemilihan Umum Legislatif 2024	https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep59598.6.pdf?refreqid=infastly-default%3A7be89fc910334\nb26ae3800c2d529f010&ab_segment\ns=0%2Fbasic_phrase_search%2Fcontrol&initiator=&acceptTC=1
Jurnal	MENGARUNGI LANSKAP OPERASI PEMENGARUH (INFLUENCE OPERATIONS) DI INDONESIA SELAMA PEMILU 2024	https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep64398.pdf?refreqid=fa\nstly-default%3A49d56d9d31caa2d\nbf6fa4d1c8c8aba41&ab_segments=\n0%2Fbasic_phrase_search%2Fcontrol&initiator=search-results&acceptTC=1
Jurnal	Politik Hukum dalam RUU Pemilu Menyongsong Pemilu yang Bermartabat	file:///C:/Users/USER/Download\ns/9965-Article%20Text-61301-1-\n10-20251202.pdf
Buku	Buku Undang-Undang Pemilihan Umum UU RI No.7 Tahun 2017	https://opac.dpr.go.id/index.php?p=show_detail&id=36440&keyw\nords=%5C%22pemilihan+umum%5C%2\n2
Buku	Bunga Rampai Politik Hukum: Dari Sistem Pemilihan Umum sampai Hak-hak Ekonomi Sosial Budaya	https://opac.dpr.go.id/index.php?p=show_detail&id=38973&keyw\nords=%5C%22pemilihan+umum%5C%2\n2
Buku	Pemilihan umum & Kedaulatan rakyat	https://opac.dpr.go.id/index.php?p=show_detail&id=27689&keyw\nords=%5C%22pemilihan+umum%5C%2\n2
Buku	Pengantar hukum pemilihan umum	https://opac.dpr.go.id/index.php?p=show_detail&id=33129&keyw\nords=%5C%22pemilihan+umum%5C%2\n2
Buku	Undang-Undang RI nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	https://opac.dpr.go.id/index.php?p=show_detail&id=31135&keyw\nords=%5C%22pemilihan+umum%5C%2\n2
Undang-undang & Peraturan	NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM 2020	https://netgrit.org/wp-content\n/uploads/2020/09/NA-RUU-Pemilu\n-per-02-Mei-2020.pdf
Undang-undang & Peraturan	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang	https://berkas.dpr.go.id/jdih/\ndocument/uu/1826.pdf
Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM	https://berkas.dpr.go.id/jdih/\ndocument/uu/1699.pdf
Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM	https://berkas.dpr.go.id/jdih/\ndocument/uu/1699.pdf
Surat kabar	Penguatan Parpol lewat Revisi UU Pemilu	https://perpustakaan.dpr.go.id\n/kliping/index/detail/id/48118
Surat kabar	Perppu Pemilu Bukan Pilihan	https://perpustakaan.dpr.go.id\n/kliping/index/detail/id/47843

Surat kabar	Revisi UU Pemilu Diharapkan Perkuat Desentralisasi	https://perpustakaan.dpr.go.id\n/kliping/index/detail/id/47998
Surat kabar	Rezim Pemilu atau Pemilunya Rezim?	https://perpustakaan.dpr.go.id\n/kliping/index/detail/id/48136